

Jik 29-09-118

Interaksi Kepentingan Strategik di Asia Timur dan Kemungkinan Pengaruhnya Terhadap Indonesia

Abdul Irsan



Pendahuluan

Di balik suasana hubungan politik pasang-surut antarnegara besar (AS, RRC, Rusia, Jepang) di kawasan Asia, sikap saling curiga dan saling mewaspada terus berlanjut dan mengarah pada persaingan persenjataan strategik yang dapat mengancam stabilitas regional. Interaksi kepentingan strategik di Asia Timur pada dasarnya melibatkan pertemuan kepentingan

AS dan RRC, yang tentunya akan berpengaruh juga di Asia Tenggara, khususnya terhadap kepentingan Indonesia.

AS masih selalu menganggap RRC dan Rusia sebagai potensi lawan yang dapat menghalangi ambisinya menciptakan Tatanan Dunia yang dilandasi prinsip demokrasi liberal. Di kawasan Asia, AS berusaha mengkonsolidasi hubungannya dengan negara-negara yang sudah berada di bawah pengaruhnya dan negara-nega-

ra yang secara tradisional memiliki hubungan yang kurang serasi dengan RRC, untuk secara terselubung menciptakan semacam “benteng pengepungan” untuk tujuan memonitor dan mengawasi kemampuan militer dan nuklir RRC. Benteng pengepungan yang tidak terlembaga itu melingkari wilayah China, mulai dari *Mongolia - Korea Selatan - Jepang - Taiwan - “Vietnam” - Thailand - Singapura - Australia - India.*

Kemajuan ekonomi dan militer RRC yang begitu cepat tetapi masih dinilai tidak transparan oleh pihak Barat seringkali mengundang pertanyaan sejauhmana sebenarnya kekuatan dan kemampuan RRC. Pertanyaan ini muncul karena dikaitkan dengan sikap dan perilaku politik RRC yang berkepentingan dengan perkembangan regional, termasuk sikap politiknya terhadap Indonesia.

Dalam melaksanakan hubungan internasionalnya di Asia, RRC masih akan terus “berhadapan” dengan kepentingan strategik AS, khususnya di Asia Timur. Bagi RRC, sikap AS terhadap Taiwan dan penjualan alat canggih militer AS ke Taiwan sejak tahun 2001, telah menimbulkan anggapan bahwa AS telah melanggar

perjanjian untuk melaksanakan “one China policy” (Komunike Shanghai 1972), walaupun kenyataan hubungan ekonomi RRC dengan AS tetap berlangsung dengan nilai volume perdagangan yang menguntungkan RRC ;

RRC berkeyakinan bahwa kerjasama militer AS dengan Jepang dan Korea Selatan dan kehadiran kekuatan militer AS di kedua negara tersebut terutama ditujukan terhadap RRC. Sementara itu, AS juga tetap beranggapan bahwa RRC memiliki ambisi “memperluas pengaruhnya” di Asia dan Pasifik. Suatu kenyataan pula bahwa dilihat dari hasil pertumbuhan ekonomi dan militernya, RRC sudah merupakan regional power.

Pertemuan kepentingan strategik AS dan RRC

Untuk mengawasi dan memonitor kemajuan pembangunan militer RRC, AS menggunakan sistem pertahanan globalnya. Beijing memang sangat khawatir dengan kecanggihan teknologi AS yang saat ini masih lebih memiliki superioritas.

Dalam waktu yang bersamaan AS tetap menempatkan kehadiran pasu-

kannya di Jepang dan Korea Selatan, yang ditujukan untuk mewaspadai kemungkinan ancaman RRC. AS tetap menilai RRC sebagai potensi ancaman. Penilaian tersebut lebih diperkuat lagi oleh adanya pengaruh sikap pihak-pihak yang memiliki garis keras untuk mendukung industri militer AS.

Kekuatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara AS diperkirakan memiliki kemampuan yang lebih dominan daripada yang sekarang dimiliki RRC, tetapi pihak Barat belum dapat memperkirakan atau mengetahui kekuatan dan kemampuan sesungguhnya yang dimiliki RRC. Dalam hubungan ini AS dengan sengaja mempersenjatai Taiwan dan negara Asia Tenggara tertentu yang menjadi sekutu AS, dengan persenjataan canggih yang dalam jangka pendek masih akan mampu menghadapi kemampuan mesin perang RRC.

Di pihak lain RRC juga selalu mewaspadai dan memperhitungkan meningkatnya kemampuan dan kekuatan militer Jepang dan Korea Selatan, dan memperhitungkan India yang memiliki persenjataan nuklir RRC juga merupakan satu-satunya negara besar yang memiliki akses langsung

melalui darat ke Asia Tenggara dan mempunyai kemungkinan akan berhadapan dengan kepentingan maritim AS dan Jepang di Asia Tenggara, khususnya di Selat Malaka dan Selat Singapura. RRC juga harus selalu memperhitungkan dan mewaspadai arah kebijakan politik Vietnam, yang mungkin kurang menguntungkan kepentingan RRC.

Hubungan strategik antara Mongolia dengan AS juga menjadi kekhawatiran RRC, apalagi setelah AS melakukan reconnaissance militernya dari wilayah Mongolia untuk memonitor instalasi nuklir RRC di Xinjiang.

Faktor RRC dalam percaturan politik regional

Kepentingan keamanan nasional RRC adalah *survival* dan *konsolidasi* seluruh wilayah RRC, yang memiliki tujuan multidimensional dengan tetap mempertahankan atau melanjutkan sistem pemerintahan komunis. RRC tetap melakukan konsolidasi seluruh wilayahnya yang dianggap sebagai miliknya atau yang sedang dituntut kepemilikannya, dengan sejauh mungkin menghindari terjadinya konflik ter-

buka selama RRC masih sedang melaksanakan modernisasi ekonomi.

Proses menuju politik non-konfrontatif dimulai sejak RRC aktif dalam pergaulan internasional dan setelah mencapai kemajuan ekonominya, yang tentunya tidak dapat dilepaskan dari kelanjutan pengaruh perubahan strategi AS yang melaksanakan politik *rapprochement* tahun 1971.

Tetap dipertahankannya sistem pemerintahan komunis di RRC karena ternyata lebih sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan merupakan faktor penting dalam mengkonsolidasi kebijakan pembangunan ekonomi nasional sebagai bagian dari pembentukan identitas bangsa untuk tetap menjaga rasa nasionalisme yang kuat. Sistem pemerintahan komunis yang sentralistik memiliki kemampuan menciptakan pemerintahan yang stabil, kuat dan berdisiplin.

RRC berhasil menjadikan negara Barat sebagai pasar utama hasil produksinya. RRC juga menjadi pesaing Barat di bidang keamanan (*multidimensional regional competitor*), bahkan dapat bersaing dengan AS sebagai "*regional power*" di Asia Timur.

RRC memperkenalkan prinsip-prinsip "*peaceful coexistence*" dalam hubungan internasional dengan menekankan penghormatan berdasarkan "*mutual respect for sovereign and territorial integrity*" dan "*non-interference with internal affairs*", yang merupakan kebijakan politik yang tidak sesuai dengan prinsip politik AS yang berkeinginan membentuk "*Tatanan Dunia Baru*" yang berdasarkan pemikiran demokrasi liberal, yang pada kenyataannya mengutamakan atau memperkuat terbentuknya dominasi korporasi (ekonomi) kapitalistik.

RRC menganggap penting kondisi Semenanjung Korea yang stabil dan tidak menghendaki konfrontasi langsung dengan pasukan AS akibat sikap Korea Utara yang masih konfrontatif, tetapi Beijing juga tidak menghendaki kalau unifikasi Korea akan berakibat menjadi berkiblat ke AS.

RRC mengkhawatirkan sikap politik Jepang yang dianggap angkuh, karena telah menggeser konsentrasi sistem pertahanannya yang tadinya diarahkan menghadapi "*ancaman dari utara*" untuk menghadapi Rusia menjadi menghadapi "*ancaman dari kawasan barat*", yang ditujukan ke China dan Korea Utara.

Untuk meningkatkan kemampuan teknologi militernya, RRC dalam tingkatan yang terbatas sedang dalam proses berkolaborasi dengan Rusia. RRC juga mewaspadai penduduk etnisnya di perbatasan dengan negara-negara di Asia Tengah yang melepaskan diri setelah ambruknya Uni Soviet. Karena itu RRC mengadakan perjanjian perdamaian dengan negara-negara di Asia Tengah untuk menghindari sikap penduduk etnisnya terpengaruh pada kondisi politik yang terjadi di wilayah tersebut.

Hubungan ekonomi dengan ASEAN sebenarnya bukan merupakan elemen vital bagi modernisasi RRC dan kehadirannya di Asia Tenggara hanya sebagai sikap strategi politik untuk mengurangi kekhawatiran terhadap RRC. RRC lebih cenderung agar group APEC menjadi kelompok komunitas kerjasama ekonomi Asia-Pasifik tanpa kehadiran AS. RRC juga bersikap "lunak" menghadapi klaim beberapa negara ASEAN di Laut China Selatan (kepulauan Spratley), karena RRC juga berkepentingan agar negara-negara Asia Tenggara dapat menerima kehadiran kekuatan maritimnya di kawasan Asia Tenggara.

Interaksi kepentingan di Asia Timur

Saat ini *tidak ada indikasi ancaman langsung* terhadap keamanan nasional RRC, karena itu RRC lebih memfokuskan melakukan modernisasi pertahanannya. Walaupun demikian, RRC tetap mengidentifikasi berbagai kemungkinan ancaman utama yang akan dihadapinya antara lain: 1). *kemungkinan bangkitnya kembali nasionalisme Rusia*; 2). *kembalinya militerisme Jepang*, dan 3). *ekspansi kekuatan maritim dan nuklir India*. Ancaman yang paling dikhawatirkan RRC adalah persepsinya bahwa AS dengan berbagai cara akan melakukan hegemoni global.

RRC menganggap bahwa suatu saat AS akan menjadikan wilayah RRC sebagai target agresinya, dengan terlebih dahulu melakukan provokasi memperkuat kelompok nasionalis yang memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. RRC menganggap AS telah mengkhianati "Komunike Shanghai 1972" yang akan melepaskan prinsip "one China policy". AS bahkan mengekspor persenjataan canggih ke beberapa negara di Asia (*termasuk Singapura dan Taiwan*), yang memungkinkan digelarnya sistem anti peluru

kendali (TMD – Theatre Missile Defense) di Asia Timur dan Asia Tenggara yang berkemampuan menetralkan sistem peluru kendali China maupun Rusia. Akibatnya, RRC membuka pintu negosiasi dengan Taiwan, yang diharapkan dapat mencapai penyelesaian agar terhindar dari konflik terbuka.

RRC memprediksi bahwa dalam jangka panjang akan terjadi persaingan kekuatan antara RRC dengan Jepang di Asia Timur, diikuti dengan persaingan untuk mendapatkan sumber energi dan pemasaran hasil produksi industrinya.

RRC menghadapi kendala geografis mengingat sangat luasnya wilayah daratan yang dibatasi oleh garis pantai laut yang panjang dan terbuka yang sangat rentan menghadapi kemungkinan ancaman dari laut maupun udara. Faktor geografis lain yang merupakan titik lemah dan ancaman keamanan RRC adalah di kawasan Manchuria dan wilayah bagian Timur. Wilayah Utara dan Tenggara juga rawan terhadap serangan peluru kendali dari kawasan laut, selain juga harus memperhitungkan kemungkinan terjadinya blockade laut. Di Utara, RRC punya garis perbatasan yang

panjang dengan Rusia, yang pernah bersikap bermusuhan dan di Timur Laut menghadapi pasukan AS yang ditempatkan di Korea Selatan dan Jepang.

Kemampuan dan efektivitas persenjataan canggih AS di Irak dan digunakannya senjata mutakhir AS oleh Israel di konflik Timur Tengah telah mengejutkan ahli militer RRC, yang langsung merevisi doktrin militernya menjadi “pertahanan aktif”. Sementara ini memang diakui oleh kalangan militer RRC bahwa AS belum akan melakukan penyerangan langsung ke wilayahnya. Namun RRC memperkirakan bahwa AS akan menghadapinya dengan tindakan militer kalau RRC sampai menggunakan kekerasan senjata di Taiwan dan terhadap klaim teritorialnya di Laut China Selatan.

Anggapan bahwa Jepang akan merupakan ancaman di tahun 2020, merupakan pendapat umum di RRC. Jepang dinilai akan bertindak sebagai peran utama untuk mengawasi ambisi RRC mendapatkan klaimnya atas wilayah yang terletak di perairan Laut China Selatan. Jepang dinilai akan meningkatkan kemampuan offshore power menghadapi RRC

mengantisipasi persoalan perbatasan wilayah lautnya. RRC sangat mengkhawatirkan kemampuan teknologi Jepang yang dinilai akan mampu menuju persenjataan nuklir dalam waktu singkat. Walaupun saat ini nuklirisasi persenjataan Jepang bertentangan dengan konstitusinya

Sepanjang tahun 1960-an sampai 1970-an, India dan Rusia merupakan dua negara yang memiliki hubungan paling buruk dengan RRC, bahkan India dan Uni Soviet menandatangani perjanjian persahabatan tahun 1971 dan dapat dikatakan membentuk "sekutu" menghadapi RRC. Pertengahan 1990-an China dan Rusia memperbaiki hubungan bilateralnya, demikian juga dengan India. Walaupun Rusia menjual peralatan militernya kepada RRC dan ditandatangani perjanjian perbatasan antara RRC dengan India tahun 1993, tetapi banyak pihak meragukan bahwa peristiwa tersebut sebagai permulaan dari berlakunya partnership di bidang keamanan antara mereka. Hubungan dan kerjasama China-Rusia baru akan menguat kembali apabila hubungan AS-Rusia mengalami hambatan. Hubungan China-Rusia saat ini cukup bersahabat dan menuju pada kerjasama yang

saling menguntungkan dan dalam posisi "bilateral confidence-building agreements" yang meliputi kesepakatan mengenai daerah perbatasan dan tidak menggunakan senjata nuklir seandainya terjadi sengketa antara mereka. Hal ini berarti China dapat menarik sebagian besar pasukan dari perbatasan, sehingga dapat memperkuat cadangan pasukannya untuk pertahanan wilayah Timur dan menambah kemampuan offshore-nya.

Masalah bilateral antara RRC dengan India bermula dari sengketa wilayah di perbatasan kedua negara. Walaupun sejak tahun 1980-an tidak pernah terjadi sengketa militer, tetapi ketidak-mampuan dua negara besar tersebut menyelesaikan secara tuntas persoalannya, menunjukkan bahwa masih adanya "mistrust" antara mereka, yang setiap saat dapat meningkatkan ketegangan. September 1993 RRC dan India menandatangani perjanjian "Line of Actual Control" wilayah perbatasan mereka. Perjanjian ini hanya merupakan kesepakatan untuk memelihara "status-quo" sampai tercapainya kesepakatan resmi antara mereka. Sebenarnya strategi utama China menghadapi India di perbatasan, utamanya adalah mencegah pengaruh India di Tibet, teruta-

ma mengingat pengaruh India terhadap penduduk etnik yang berada di wilayah perbatasan. Dikuasainya Tibet oleh RRC berarti terisolirnya kekuatan subversive di wilayah perbatasan RRC. Kemampuan nuklir RRC dan kemampuan peluru kendalinya adalah juga untuk upaya mengimbangi India agar tidak ikut campur dalam persoalan Tibet. Faktor kedekatan hubungan strategik antara India dengan AS merupakan perkembangan baru yang lebih meyakinkan RRC bahwa AS masih meneruskan kebijakan pengepungan terhadap RRC.

Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia ?

Letak geografis Indonesia sebagai Negara Kepulauan dengan kekayaan alamnya, di satu sisi merupakan nilai tawar positif bagi peningkatan hubungan luar negeri Indonesia dalam rangka membangun kesejahteraan rakyatnya. Di sisi yang lain, Indonesia masih selalu menghadapi kepentingan strategik negara-negara besar terhadap kekayaan alam dan letak wilayah Indonesia. Situasi global tidak lagi menggambarkan adanya persaingan blok ideologi secara terbuka, te-

tapi kenyataan menunjukkan masih adanya "persaingan kepentingan" antara kekuatan politik di dunia, yang masih tetap menggunakan persaingan senjata sebagai sarana pengimbang bahkan sebagai alat saling memusnahkan.

Faktor kepentingan AS dan RRC tetap mewarnai terjadinya persaingan kepentingan politik di Asia Timur dan di Asia Tenggara. Suasana perbedaan kepentingan politik yang diikuti terjadinya persaingan persenjataan, membawa suasana regional hampir menyerupai kondisi seperti ketika masih berlangsungnya "perang dingin", Persaingan antara negara-negara besar di Asia Timur lebih banyak dipicu oleh sikap saling curiga yang bukan dikarenakan faktor pertentangan ideologi. Masing-masing beranggapan kalau pihak yang lain berkeinginan mendominasi;

Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang rentan terhadap akibat berlangsungnya persaingan kepentingan negara-negara asing di wilayah Indonesia, sering mempersulit posisi politik Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Menghadapi terjadinya interaksi persaingan kepentingan antara negara-negara asing tersebut, Indonesia

yang secara geografis merupakan Negara Kepulauan, seyogianya mengimbangnya dengan memiliki kemampuan melindungi kedaulatannya sebagai Negara Maritim yang kuat, baik yang meliputi kemampuan *militer, pertahanan dan keamanan* maupun kemampuan di bidang-bidang *politik, ekonomi, budaya, perdagangan, transportasi, komunikasi, telekomunikasi, dan teknologi*. Suatu kekuatan Negara Maritim yang keseluruhan unsurnya harus dikuasai oleh bangsa Indonesia sendiri dan bukan dikuasai atau dimiliki bangsa asing, demi untuk dapat mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Kemungkinan terjadinya “pergeseran” kewenangan militer dari sistem teritorial untuk dijadikan sistem maritim, memang harus ditanggapi secara bijaksana demi menjaga integritas bangsa;

Upaya “pengepungan” AS terhadap RRC dengan memanfaatkan Mongolia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, “Vietnam”, Thailand, Singapura, Australia dan India tidak terlepas dari tindakan strategik menghalangi dominasi RRC. Dari sudut kepentingan AS, Indonesia merupakan “missing link” yang akan dijadikan sasaran pendekatan AS selanjutnya untuk

memperketat “pengepungannya” terhadap RRC. Contoh “terkuncinya” pesawat *Sukoi AURI* baru-baru ini ketika sedang melakukan latihan di wilayah *perairan Indonesia*, dapat dianggap sebagai “warning” AS yang menggunakan sekutunya memamerkan supremasi persenjataan AS yang menguasai teknologi canggih yang mampu menetralsir peluru kendali musuh (TMD);

Indonesia yang memiliki kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif dianggap tidak sepenuhnya mendukung terbentuknya suatu Tatanan Dunia Baru seperti yang dikehendaki AS dan sekutunya. Masih menjadi pertanyaan apakah kehadiran Presiden Barack Obama sebagai presiden baru AS akan dapat mengubah persepsi AS dalam menilai perkembangan dunia dewasa ini.

Walaupun Indonesia dengan sadar cenderung melaksanakan “soft power policy” untuk menghindari kekerasan agar dapat tetap memelihara suasana damai di kawasan dengan selalu mempertimbangkan faktor moral dan etika positif dalam diplomasinya, tetapi merupakan perjuangan diplomasi yang tidak ringan untuk menuntut negara tetangga Indonesia

menanggapinya dengan etiked yang sama.

Politik bertetangga baik Indonesia mau tidak mau harus *didahului, didukung* bahkan *diimbangi* dengan upaya meningkatkan kemampuan politik (*diplomasi*), *ekonomi, teknologi* bahkan *kekuatan militer*, agar terjadi *keseimbangan kekuatan* di Asia Tenggara. Tanpa ada keseimbangan kekuatan dan keseimbangan kemampuan antarnegara se-kawasan, maka

kestabilan politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara akan sering mengalami gangguan, sekalipun semua negara di Asia Tenggara sudah tergabung dalam ASEAN. Hal ini tentunya sangat terkait antara lain dengan perjalanan sejarah hubungan antarnegara di Asia Tenggara di masa-masa lalu akibat politik penjajahan dan juga keberpihakan kebijakan politik masing-masing negara anggota ASEAN dalam menanggapi persaingan politik dunia. □

